



Pengaruh Transfer Pemerintah Terhadap Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Dalam Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal

Siti Aisah Bauw¹, Lillyani M. Orisu¹, Melkion D.T. Worabay²

¹Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Papua

²Alumni Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Papua

Permalink/DOI: <http://dx.doi.org/10.32830/jfres.v1i1.1024.g767>

Received: May 2018; Accepted: August 2018; Published: September 2018

Abstrak

Transfer pemerintah merupakan salah campur tangan pemerintah pusat pada daerah otonom yang bertujuan untuk membantu daerah yang kapasitas fiskalnya rendah. Dengan perkembangan transfer pada Kabupaten Manokwari yang selalu meningkat, menggambarkan pengeluaran pemerintah dalam pembiayaan pembangunan masih tergantung pada pemerintah pusat atau dana perimbangan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh transfer pemerintah terhadap kinerja fiskal Kabupaten Manokwari dalam pelaksanaan desentralisasi. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis pengaruh transfer pemerintah terhadap kinerja fiskal pemerintah daerah Kabupaten Manokwari dalam pelaksanaan desentralisasi. Dengan tahun pengamatan selama lima tahun. Estimasi model di analisis dengan menggunakan regresi linear sederhana (simple linier regression) dengan pengujian hipotesis secara parsial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel indeks transfer pemerintah memiliki nilai koefisien positif (+) terhadap kinerja fiskal pemerintah daerah, dengan nilai R^2 86% menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja fiskal pemerintah daerah.

Kata kunci: transfer pemerintah, kinerja fiskal, pemerintah daerah

Abstract

Government transfers are one of the central government's interventions in autonomous regions that aim to help regions with low fiscal capacity. With the development of transfers in Manokwari Regency which is always increasing, describing government spending in financing development still depends on the central government or balance funds. The purpose of this study was to determine the effect of government transfers on the fiscal performance of Manokwari Regency in the implementation of decentralization. This study is aimed at analyzing the influence of government transfers on the fiscal performance of the Manokwari District government in the implementation of decentralization. With five years of observation. Model estimation is analyzed using simple linear regression (simple linear regression) by partially testing the hypothesis. The results showed that the variable government transfer index had a positive coefficient (+) on the fiscal performance of the regional government, with a R^2 value of 86% indicating a significant influence on the fiscal performance of the local government.

Keywords: government transfer, fiscal performance, local government

How to Cite: Bauw, S.A., Orisu, L.M., Worabay, M.D.T. (2018). Pengaruh Transfer Pemerintah terhadap Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari dalam Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal. *JFRES: Journal of Fiscal and Regional Economy Studies*, 1 (1), 61-68.
doi: <http://dx.doi.org/10.32830/jfres.v1i1.1024.g767>

PENDAHULUAN

Sistem transfer dana yang digunakan di Indonesia merupakan hasil evolusi dalam kurun waktu lebih dari 50 (lima puluh) tahun sejak tahun 1945. Sistem transfer ini mempunyai arti yang sangat penting, karena pengeluaran Pemerintah Daerah sebagian besar, sekitar dua pertiganya, dibiayai dari transfer yang diberikan oleh Pemerintah Pusat (Raksaka, 2002). Otonomi daerah yang digunakan sejak satu Januari 2001 membawah dampak adanya perubahan sistem fiskal termasuk di antaranya hubungan antara tingkat pemerintah dalam bidang fiskal, di mana hingga saat ini masih menjadi isu pokok penting. Salah satu alasan penyelenggara otonomi daerah adalah agar pembangunan di daerah berjalan seiring dengan pembangunan di pusat. Ini merupakan bentuk koreksi atas pelaksanaan pembangunan yang selama ini kebijakannya bersifat sentralistik dan kurang memperhatikan daerah. Jadi dalam otonomi daerah terkandung maksud memberikan peluang dan kebebasan kepada daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri (Israt dan Sudarni, 2001).

Pendanaan atas penyerahan urusan kepada pemerintahan daerah menganut prinsip *money follow function*, di mana pendanaan mengikuti fungsi pemerintah yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintah. Masalah keuangan daerah timbul karena keterbatasan dana yang di himpun oleh pemerintah daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam membangun daerahnya. Kabupaten Manokwari tidak dapat terlepas dari masalah keuangan daerah, sehingga

diperlukan sumber penerimaan daerah yang lain dan salah satunya adalah bantuan dari Pemerintah Pusat.

Transfer antar pemerintah merupakan fenomena umum yang terjadi di semua negara di dunia terlepas dari sistem pemerintahannya (Fisher, 1996 dalam Kuncoro, 2004), dan bahkan sudah menjadi ciri yang paling menonjol dari hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Tujuan utama dari implementasi transfer adalah untuk menginternalisasikan eksternalitas fiskal yang muncul lintas daerah, perbaikan sistem perpajakan, koreksi ketidakefisienan fiskal, dan pemerataan fiskal antar daerah (Oates, 1999 dalam Gorodnichenko, 2001).

Alokasi transfer di negara-negara sedang berkembang pada umumnya lebih didasarkan pada aspek pengeluaran pemerintah daerah tetapi kurang memperhatikan kemampuan pengumpulan pajak local, (Oates, 1999 dalam Gorodnichenko, 2001).

Pengeluaran daerah pada Kabupaten Manokwari merupakan seluruh pengeluaran yang bersumber dari kas daerah Kabupaten Manokwari dalam periode satu tahun anggaran. Pengeluaran dapat di kelompokkan menjadi belanja aparatur daerah, belanja pelayanan publik, belanja transfer, dan belanja tidak tersangka. Tabel 1 menunjukkan bawah total Pengeluaran Daerah pada Kabupaten Manokwari dari Tahun 2008 – 2012, selalu mengalami Peningkatan dari tahun ke tahun, di mana pengeluaran pemerintah terendah pada Kabupaten Manokwari adalah sebesar Rp.730.932.206.670 pada tahun 2008, dan tertinggi sebesar Rp.991.161.236.138 pada tahun 2012. (BPS, 2008-2012).

Tabel 1. Total Pengeluaran Daerah, Dan Total Transfer Pemerintah Menurut Kabupaten Manokwari Tahun 2008 – 2012 (Ribu Rupiah)

Tahun	Total Pengeluaran Daerah	Total Transfer
2008	730.932.206.670	510.759.873.083
2009	800.986.931.386	545.727.750.338
2010	880.653.765.085	568.964.837.552
2011	858.861.622.707	618.521.740.178
2012	991.161.236.138	704.456.081.365

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari, 2008-2012 (data diolah).

Total transfer pemerintah pada tabel 1 menunjukkan bahwa nilai transfer pemerintah selalu mengalami peningkatan, dari tahun pengamatan yaitu tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, menunjukkan bantuan pemerintah pusat masih sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Manokwari.

Transfer pemerintah pusat dalam hal ini dana perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang di alokasi kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam menjalan roda pemerintahan di daerah. Serta bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (BPS, Realisasi APBD 2012). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat sangat besar dalam pembiayaan pengeluaran daerah.

Penelitian serupa telah dilakukan sebelumnya pada lokasi yang berbeda. Salah satunya adalah Sulistyowati (2006) yang telah menganalisis ketimpangan fiskal vertikal Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah sebelum dan sesudah otonomi. Penelitiannya menggunakan data sekunder yaitu Laporan APBD Kabupaten Jayapura tahun 2002 – 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen keuangan di Kabupaten Jayapura kurang efektif. Disamping itu nilai kontribusi neraca keuangan pada pendapatan nasional menunjukkan adanya ketergantungan yang tinggi dari perimbangan pendapatan. Sisi pengeluaran cenderung memperkecil kenaikan anggaran pengeluaran rutin untuk pembangunan, sehingga kondisi makro tidak banyak mempengaruhi akselerasi pembangunan ekonomi. Sistem defisit anggaran pemerintah akan mengoptimalkan pembangunan dalam 3 cara pertama usaha pemerintah untuk mengoptimalkan kemampuan internal, kedua pemerintah harus menetapkan prioritas secara jelas pada alokasi anggaran pembangunan daerah. Ketiga prinsip anggaran deficit atau surplus bagi pemerintah.

Selanjutnya, Erniati (2006) menganalisis dampak transfer pemerintah terhadap kinerja fiskal pemerintah daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan

desentralisasi fiskal, Pendapatan asli daerah (PAD), pengeluaran rutin, pengeluaran pembangunan, transfer pemerintah, PDRB, IHK, dan jumlah penduduk. Menggunakan analisis regresi data panel, hasilnya menunjukkan bahwa transfer pemerintah, PDRB dan IHK berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja fiskal pemerintah daerah yang di ukur oleh PAD, pengeluaran rutin, pengeluaran pembangunan dan jumlah penduduk dalam erah desentralisasi fiskal. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah transfer pemerintah berpengaruh terhadap kinerja fiskal pemerintah daerah Kabupaten Manokwari dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal”?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dan verifikatif yang digunakan untuk menganalisis pengaruh transfer pemerintah terhadap kinerja fiskal pemerintah daerah, sedangkan kinerja pemerintah daerah yang di maksud adalah total pengeluaran pemerintah. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Manokwari dengan periode pengamatan tahun 2008-2012. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, menurut Indriantoro dan Supomo (2002), data sekunder adalah sumber data yang di peroleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (di peroleh dan catat oleh pihak lain). Metode pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah; 1) Penelitian Lapangan (*Field Research*), data sekunder berupa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Manokwari, Realisasi Transfer Pemerintah pada Badan Pusat Satatistik (BPS), dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari, Periode 2008 – 2012, 2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), memperoleh berbagai informasi untuk dijadikan sebagai dasar teori dan acuan untuk mengolah data dengan cara membaca, mempelajari, menelaah dan mengkaji literatur-literatur berupa buku-buku, jurnal, peneliti terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dan 3) Riset Internet (*Online Research*), pengumpulan data berasal dari situs-situs terkait untuk memperoleh

tambahan literatur jurnal dan data lainnya, (Supomo, 2002).

Analisis Regresi digunakan untuk melakukan prediksi seberapa besar nilai variabel *dependent* jika nilai variabel *independent* dirubah. Adapun Model yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = a + \beta X_1 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y	=	Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah
X ₁	=	Transfer Pemerintah
a	=	Satuan Bilangan Konstanta
β	=	Koefisien Regresi
ε	=	Standar Error

Hipotesis

Berdasarkan uraian permasalahan maka hipotesis yang diajukan adalah transfer pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja fiskal pemerintah Kabupaten Manokwari dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Langkah penentuan hipotesis nol (H₀) dan Alternatif (H_a):

H ₀ : β ≤ K	H _a : β > K
H ₀ : β ≥ K	H _a : β < K
H ₀ : β = K	H _a : β ≠ K

Pengujian arah hipotesis adalah dua arah dengan α = 0,05

H₀: β = 0, artinya tidak terdapat pengaruh nyata transfer pemerintah terhadap kinerja fiskal pemerintah Kabupaten Manokwari dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, dengan α = 5%.

H₁: β ≠ 0, artinya terdapat pengaruh nyata transfer pemerintah terhadap kinerja fiskal pemerintah Kabupaten Manokwari dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, dengan α = 5%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia memasuki babak baru pengelolaan pemerintah dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi. Bentuk pelaksanaan sistem desentralisasi ini di tandai dengan berlakunya

otonomi daerah yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang Mengatur Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal, (Adi, 2006).

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang lebih efektif, efisien dan bertanggung jawab. Implementasi otonomi daerah diharapkan meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta antara pemerintah daerah, (Sidik, 2002). Terkait dengan hal tersebut, pemerintah pusat turut campur tangan melalui pemberian bantuan atau transfer dana perimbangan bagi daerah, antara lain dana bagi hasil pajak/bukan pajak (SDA), dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat semakin baik, (Wijadajaja, 2002).

Secara umum tujuan pemerintah pusat melakukan transfer kepada daerah adalah; 1) Sebagai tindakan nyata untuk mengurangi ketimpangan pemberian “kue nasional” baik vertikal maupun horizontal; 2) Suatu upaya untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah dengan menyerahkan sebagian kewenangan di bidang pengelolaan negara dan agar manfaat yang dihasilkan dapat di nikmati oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.

Tabel 2 menunjukkan alokasi dana perimbangan di Kabupaten Manokwari dari tahun 2008-2012. Di mana dari ketiga jenis dana perimbangan di atas yang menunjukkan nilai tertinggi adalah transfer dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp. 2.127.890.109.400 dan terendah adalah transfer dana alokasi khusus sebesar Rp. 229.112.570.000.

Tabel 2. Realisasi Transfer Dana Perimbangan Kabupaten Manokwari Tahun 2008 – 2012

Tahun	Dana Perimbangan (Rp)			Total Dana Perimbangan
	DBH Pajak/Bukan Pajak (SDA)	DAU	DAK	
2008	144.553.272.083	334.244.601.000	61.962.000.000	510.759.873.083
2009	98.585.944.338	395.180.806.000	51.963.000.000	545.727.750.338
2010	117.911.371.152	397.456.966.400	53.596.500.000	703.082.782.331
2011	113.860.319.178	443.987.821.000	60.673.600.000	618.521.740.178
2012	92.992.196.365	557.019.915.000	54.513.970.000	704.526.081.365
Total	537.901.103.116	2.127.890.109.400	229.112.570.000	

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat 2013 (*Diolah*)

Sedangkan transfer dana perimbangan di Kabupaten Manokwari berfluktuatif (tahun 2011) Rp. 618.521.740.178 dan tertinggi pada tahun 2012 sebesar Rp. 704.526.081.365 kemudian terendah pada tahun 2008 sebesar Rp. 510.759.873.083 berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, besarnya dana alokasi umum sekurang-kurangnya 25 persen dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. Dana alokasi umum untuk daerah Provinsi Papua dan untuk daerah kabupaten dan kota ditetapkan masing-masing 10 persen dan 90 persen dari dana alokasi umum.

Kinerja atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, (Halim, 2004). Tingkat kemandirian daerah berdasarkan sumbangan pemerintah pusat kepada daerah di mana semakin tinggi sumbangan daerah semakin lemah desentralisasi fiskal (tingkat kemandirian daerahnya). Semakin rendah sumbangan daerah, maka semakin kuat desentralisasi fiskalnya (tingkat kemandiriannya).

Kebijakan fiskal menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yaitu kabupaten dan kota untuk melaksanakan pembangunan. Hal ini berarti bahwa pemerintah pusat memberikan kebebasan kepada daerah untuk menyelenggarakan pengelolaan dan pembiayaan dilakukan oleh pemerintah daerah dan kota.

Sedangkan dalam penelitian ini, penulis dalam melihat kinerja fiskal pemerintah daerah di lihat dari sisi finansial di mana pengeluaran peme-

rintah sebagai tolak ukur dalam melihat kinerja fiskal pemerintah daerah, khususnya kinerja pemerintah daerah Kabupaten Manokwari.

Tabel 3 menunjukkan realisasi pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2008 sampai dengan 2012, dimana menunjukkan total pengeluaran yang berfluktuasi dan cenderung meningkat di daerah otonomi, di mana pada tahun 2008 sebesar Rp.730,93 milyar kemudian meningkat pada tahun 2010 sebesar Rp.880,65 milyar kemudian pada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar Rp.858,86 milyar dan kemudian kembali mengalami pada tahun 2012 sebesar Rp.991.16 milyar. Hal ini dilakukan pemerintah dalam pembiayaan pembangunan di daerah baik pembangunan sarana dan prasarana guna mendukung pelayanan publik yang lebih efisien serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah, searah dengan Bonai (2010) yang meneliti kajian pengelolaan keuangan Kabupaten Jayapura pada era otonomi khusus: Realisasi APBD yang terdiri dari Pendapatan Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan sebagai objek dalam penelitian.

Tabel 3. Realisasi Total Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Manokwari

No.	Tahun	Realisasi (Rp)
1	2008	730.932.206.670
2	2009	800.986.931.386
3	2010	880.653.765.085
4	2011	858.861.622.707
5	2012	991.161.236.138

Sumber: BPS Kabupaten Manokwari 2013 (*data diolah*)

Untuk mengetahui sah atau tidaknya model regresi yang digunakan sebagai model penjelas bagi pengaruh antar variabel, di mana terdapat beberapa syarat klasik yang harus di penuhi dari suatu model regresi antara lain; uji Normalitas, uji Autokolerasi, dan uji Heteroskedastisitas.

Uji Normalitas berdasarkan hasil estimasi pada nilai Durbin Watson sebesar 2,520 dan $dU = 1,400$ (*Tabel Statistik Durbin-Watson*). Berdasarkan Kriteria maka $dU < DW$ tes $< (4-dU)$ atau $1,400 < 2,520 < 2,600$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokolerasi pada model regresi yang digunakan. Uji Heteroskedastisitas, banyak metode statistik yang digunakan untuk menentukan apakah suatu model terbebas dari masalah heteroskedastisitas atau tidak, dimana nilai t -statistik menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,553 secara statistik dan α , 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan memenuhi syarat dari uji klasik atau uji heteroskedastisitas, sehingga dapat disimpulkan model tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana di peroleh model atau fungsi regresi atau pengaruh antar variabel di mana pengaruh dari transfer pemerintah terhadap kinerja fiskal pemerintah daerah jika dituliskan dalam persamaan regresi adalah sebagai berikut:

$$\text{Kinerja Fiskal} = 1.381E-11 + 1.212 \text{ Transfer Pemerintah} + e$$

Hasil estimasi regresi menunjukkan bahwa model regresi yang di peroleh nilai koefisien variabel transfer pemerintah (*independen variabel*) sebesar 1.212 menggambarkan bahwa Transfer Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari, artinya semakin besar transfer pemerintah akan meningkatkan kinerja fiskal pemerintah daerah Kabupaten Manokwari.

Hasil pengolahan data (R^2) sebesar 0,885, menggambarkan sumbangan variabel independen (Transfer Pemerintah) terhadap naik-turunnya atau variasi variabel dependen (Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah) sebesar 0,885 atau 0,86 persen dan sisanya sebesar 14 persen merupakan sumbangan dari variabel lain yang di tidak dimasukan dalam model yang diajukan

(terkumpul dalam variabel pengganggu atau E). Sedangkan untuk nilai R (*R Majemuk*) sebesar 0,940 atau 9,40 persen menunjukkan hubungan antara variabel Independen dan variabel dependen mempunyai hubungan yang sangat kuat dikarenakan nilai R mendekati 100 persen. Variabel transfer pemerintah, yaitu $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ atau $4,794 \leq 3,182$ artinya ada pengaruh yang signifikan terhadap kinerja fiskal pemerintah daerah.

Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kinerja fiskal pemerintah daerah Kabupaten Manokwari, berdasarkan hasil etimasi analisis statistik di atas, transfer pemerintah mempunyai pengaruh yang positif terhadap kinerja fiskal pemerintah daerah Kabupaten Manokwari terlebih khusus pada total pengeluaran pemerintah, serta membandingkan dengan kondisi rill di lapangan dengan presentase dana perimbangan dan PAD sebagai salah indikator dalam hal kemandirian daerah pada erah desentralisasi, selama tahun pengamatan pada studi penelitian ini yaitu pada tahun 2008 sampai dengan 2012.

Variabel transfer pemerintah merupakan bagian dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kabupaten Manokwari. Hasil dari estimasi statistik regresi linear sederhana menunjukkan koefisien transfer pemerintah berpengaruh positif dan signifikan pada $\alpha = 0,05$. Hal ini berarti bahwa transfer pemerintah berdampak positif terhadap kinerja fiskal pemerintah daerah atau dalam penelitian ini untuk mengukur kinerja fiskal pemerintah daerah di lihat dari segi total pengeluaran daerah. Koefisien regresi sebesar 1,212 (%) yang menunjukkan bahwa apabila transfer pemerintah naik sebesar satu persen pertahun *Ceteris Paribus* akan menaikkan jumlah pengeluaran pemerintah (kinerja fiskal pemerintah daerah) sebesar 1,212(%).

Hal ini searah dengan penelitian dari Khalifa 2004, dengan judul analisis realisasi anggaran pendapatan daerah, (studi khusus Kabupaten Hulu Sungai Tengah) di mana proporsi sumbangan dana perimbangan untuk pendapatan daerah lebih dominan dibandingkan dengan sumbangan dari pendapatana asli daerah (PAD). Hal yang sama dengan penelitian Haryadi 2001,

tentang estimasi penerimaan dan belanja daerah serta derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Belitung “studi khusus anggaran 2001” dengan kesimpulan hasil estimasi APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2001 perbandingan antara PAD dan dana perimbangan terhadap TPD (total pendapatan daerah) yang mana PAD sebesar 11,61%, sedangkan dana perimbangan sebesar 81,21%.

Berdasarkan Gambar 2 Presentase Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manokwari Tahun 2008–2012 menunjukkan presentase dana perimbangan lebih mendominasi dalam pembiayaan pembangunan di Kabupaten Manokwari. Hal ini searah dengan hasil estimasi dari penelitian ini.

Pada Tabel 4, secara rill perkembangan variabel penelitian dilapangan sebagaimana terlihat bahwa Kabupaten Manokwari masih tergantung pada bantuan pemerintah pusat. Sedangkan tingkat kemandirian daerah di era desentralisasi di lihat berdasarkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada daerah tersebut, sehingga pada penelitian ini penulis merekomendasi untuk penelitian selanjut untuk secara khusus melihat terkait dengan kinerja fiskal pemerintah daerah melalui pendapatan asli daerah (PAD) sebagaimana dalam melihat kapasitas fiskal adalah rata-rata kapasitas fiskal standar suatu daerah. Semakin tinggi PAD, semakin kuat pula derajat desentralisasi (tingkat kemandirian daerah). Semakin rendah PAD, maka semakin lemah pula derajat desentralisasi fiskalnya atau tingkat kemandirian daerah, (Halim, 2004).

Tabel 4. Presentase Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2008-2012

No.	Tahun	Dana Perimbangan (%)	Pendapatan Asli Daerah (%)
1	2008	94,73	5,26
2	2009	95,27	4,73
3	2010	95,19	4,81
4	2011	96,57	3,43
5	2012	96,17	3,83

Sumber: BPS Kabupaten Manokwari 2013 (data diolah)

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan di Kabupaten Manokwari dengan Periode pengamatan tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, adalah sebagai berikut Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) merupakan salah satu sumber bagi pendapatan daerah, (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penyerahan Wewenang Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, pasal 157). Hasil estimasi menunjukkan koefisien Transfer Pemerintah (dana perimbangan) berpengaruh positif dan signifikan pada $\alpha = 0,05$. Hal ini berarti bahwa transfer pemerintah (dana perimbangan) mempunyai pengaruh yang positif terhadap kinerja fiskal pemerintah daerah atau pengeluaran pemerintah. Koefisien regresi sebesar 1,212 (1%) yang menunjukkan bahwa apabila transfer pemerintah (dana perimbangan) naik sebesar satu persen pertahun *ceteris paribus* akan menaikkan tingkat kinerja pemerintah daerah Kabupaten Manokwari atau total pengeluaran dalam hal ini sebesar 1,212 (1%). Sehingga hipotesis atau dugaan yang menyatakan transfer pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja fiskal pemerintah daerah dapat di terima.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonia K Bonai. 2008. Kajian Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jayapura Pada Era Otonomi Khusus.
- Dispenda dan BPS Kabupaten Manokwari. 2012. RealisasiPenyaluran Dana Transfer ke Daerah Tahun 2007-2012.
- Gorodnichenko, Y. 2001. *Effect of Intergovernmental Aid Fiscal Behavior of Local Governments: The Case of Ukraine, Master Thesis, University of Kiev*. Available: <http://www.eec.kiev.ua/research/matheses/2014/pdf/gorodnichnko.pdf>
- Keputusan Menteri Dalam Negeri, Nomor 29 Tahun. 2012. Tentang Pedoman, Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan

- Daerah dan Penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Kuncoro, Mudrajad. 1995. "Desentralisasi Fiskal di Indonesia: Dilema Otonomi dan Ketergantungan" dalam PRISMA, April 1995, LP3ES, Jakarta.
- Israt, M.dan Sri Sudarsi, 2001. "Otonomi Daerah: Beberapa Masalah dalam Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah" Gema Stikubank, Edisi 33, No, 1 hal 1 - 13
- Papua Barat Dalam Angka, Terbitan Tahun 2012
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun. 2000. Tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
- Sidik, Machfud (eds). 2002. Dana Alokasi Umum; Konsep *Fiscal Relations In Indonesia, World Bank Discussion Paper No. 29 The World Bank, Washington DC*
- Pemerintah Daerah Yogyakarta: UAD Press.
- Sugiyono. 2004. Metode Penelitian Pendidikan; Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D Bandung; Alfabeta
- Sulistiyowati. 2006. Ketimpangan Fiskal Vertikal Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah, vol 1.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun. 2004. Tentang Hak, Wewenang dan Kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.